

MEMPERBAIKI PEREKONOMIAN DENGAN UPAYA MEMBANGUN SISTEM

Bedjo Sukarno

Fisip Universitas Slamet Riyadi Surakarta

ABSTRACT

People's anguish and concern towards the bad circumstance in Indonesia should be one of significant aspect to redevelop the economy. Furthermore, investment atmosphere is urgently improved in this circumstance. Political stability will give a great contribution towards economical stability, and in reverse, economical stability is on a must to create a political stability.

Investment atmosphere in Indonesia's bad circumstance should be improved by a collective awareness and real movements from government and civil society. That is related to the weakness of law enforcement, political-social stability and civil security in Indonesia. The crisis in real sector that is showed by the high unemployment and poverty rates is caused by the instability in investment, both domestic and foreign investments.

Keywords: *building a system, economic growth, investment*

Pendahuluan

Telah terasa bagi masyarakat Indonesia bahwa selama sembilan tahun hingga sekarang mengalami pergantian presiden sebagai implementasi pemerintahan sampai kali ke empat, masih belum menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan ekonomi yang menggembirakan, bahkan memprihatinkan.

Dengan banyaknya hambatan pertumbuhan ekonomi, salah satunya yang belum lama ini terjadi bencana yang hampir terus menerus melanda di Indonesia, pertumbuhan ekonomi baru mencapai 4,6% hingga 5,1% dari target 5,5% - 6%. Selain menurunnya konsumsi masyarakat yang selama ini menopang pertumbuhan ekonomi, kelambatan persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di beberapa daerah turut menyebabkan lambatnya pertumbuhan ekonomi.

Faktor utama penyebab pertumbuhan investasi dalam negeri terpuruk adalah suku bunga yang masih tinggi (Boediono, Kompas, 29 Juli 2006). Ketidakmampuan pemerintah daerah memanfaatkan dana yang tersedia untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi, karena surplus dana yang berasal dari dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah ternyata tidak dimanfaatkan secara optimal, justru ditaruh di bank, selanjutnya ditempatkan pada sertifikat Bank Indonesia.

Dalam situasi tersebut, terjadi antara lain karena tidak adanya kepastian hukum dalam pembangunan proyek, perencanaan yang kurang matang dan kemauan daerah yang rendah secara politik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi akan berdampak logis terhadap meningkatnya angka pengangguran. Saat ini penganggur total atau terbuka mencapai 10,9 juta, sedangkan setengah penganggur sekitar 40,1 juta atau 37% dari total angkatan kerja sebesar 106,9 juta. Pertumbuhan ekonomi yang rendah juga menghilangkan momentum untuk memulihkan diri lebih cepat dari kemerosotan sehabis krisis (Bambang Brojonegoro, Kompas, 2 Juli 2006).

Penderitaan rakyat dan keprihatinan besar yang sedang melanda negeri seharusnya menjadi pendorong untuk secepatnya membangun kembali perekonomian. Serta pembenahan iklim investasi kian mendesak untuk secepatnya direalisasikan.

Sistem Desentralisasi

Stabilitas politik merupakan prasyarat bagi adanya stabilitas ekonomi, dan sebaliknya stabilitas ekonomi juga merupakan prasyarat bagi adanya stabilitas politik.

Dalam kondisi normal, biasanya jatuhnya suatu rezim dimulai dengan munculnya ketidakstabilan ekonomi, di mana inflasi melonjak, dan persediaan barang di sektor riil merosot, sehingga mendorong rakyat untuk menuntut perbaikan ekonomi dan selanjutnya mulai timbul kekacauan politik. Namun perbaikan kondisi perekonomian tidak mungkin dicapai bila kondisi politik tidak stabil, segala keputusan politik yang tidak menentu akan selalu menimbulkan ketidakpercayaan rakyat.

Ketidakstabilan politik itu tercermin pada ketidakstabilan ekonomi terutama dalam bentuk kenaikan kurs valuta asing, dan turunnya nilai rupiah disertai dengan turunnya indeks harga saham gabungan. Jadi antara kedua variabel tadi saling bergantung satu sama lain yang berpengaruh pada penciptaan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sehingga pembangunan ekonomi selanjutnya akan menjadi semakin mantap. Menjelang berakhirnya tahun 2000 dan memasuki tahun 2001, sistem pemerintah dengan otonomi daerah akan direalisasikan. Konsep dasar adalah memberikan wewenang kepada daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerahnya masing-masing sesuai dengan apa yang mereka kehendaki, dan pemerintah pusat akan membantu dan memelihara kegiatan-kegiatan yang tidak mungkin dilaksanakan di daerah seperti masalah kebijakan moneter, pembangunan jalan antar kota dan provinsi.

Berkait dengan implementasi sistem desentralisasi tidak akan lepas dari adanya kesiapan masing-masing daerah yang menyangkut permasalahan pendanaan maupun masalah sumberdaya manusianya. Dengan sistem ini, di mana daerah didorong untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, banyak daerah yang memikirkan bagaimana meningkatkan tarif pajak dan retribusi daerah serta memikirkan untuk menciptakan obyek-obyek pajak dan retribusi daerah yang baru (Suparmoko, 2001).

Kesiapan daerah tidak hanya dilihat dari segi keuangannya saja, melainkan juga dilihat dari kesiapan sumberdaya manusianya yang mampu untuk mengelola

dana yang ada dan kreatif di dalam menciptakan pelayanan kepada masyarakat termasuk sumber-sumber dana untuk pembiayaannya. Masyarakat sesungguhnya tidak akan keberatan membayar pungutan apapun asalkan hasil pungutan tersebut digunakan sebaik-baiknya demi kesejahteraan masyarakat.

Hendaknya tetap diingat bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak seluruhnya dapat disediakan oleh pemerintah daerah, kecuali untuk kegiatan-kegiatan yang manfaatnya lebih bersifat lokal. Menurut mantan Menko Perekonomian Dorojatun Kuntjoro menyarankan agar pemerintah menerapkan sistem insentif dan penalti untuk mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan pemanfaatan APBD guna mendorong pergerakan ekonomi di daerah dan pertumbuhan ekonomi (Kompas, 7 Juli 2006).

Untuk itu maka pemerintah pusat bertekad untuk memberikan kebebasan pemerintah daerah dalam berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah agar melemahnya subsidi dari pemerintah pusat tidak mengganggu perkembangan ekonomi maupun jalannya pemerintahan di daerah.

Sistem Perekonomian

Sistem ekonomi kapitalisme bermula dari merkantilisme bahwa negara berhak dan berkewajiban mengatur dan melindungi dunia usaha dan dengan prinsip kebebasan tercipta menyangkut industri yang dalam perkembangannya menciptakan kelas tenaga kerja yang radikal dan membentuk gerakan politik melawan orde kapitalis.

Perkembangan selanjutnya keseimbangan antara sosial, politik dan ekonomi antara bisnis, pemerintah dan tenaga kerja yang diorganisasi dapat menciptakan ketenangan, ketenteraman dan kedamaian dalam bermasyarakat, sehingga upaya kesejahteraan masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik dalam kondisi stabilitas yang relatif lama.

Aliran anti Kapitalis menurut Marx (Sukanto Reksohadiprodjo, 2001) menganalisis bahwa memang kapitalis berhasil di dalam proses pembangunan, namun kapitalis menciptakan kelas buruh yang besar yang sama sekali tidak memiliki sumber kegidupan kecuali menjual tenaganya.

Di dalam kapitalisme, tenaga kerja merupakan barang dagangan biasa sehingga upah tergantung pada hukum permintaan dan penawaran dan mengarah ke tingkat subsistem, hanya cukup untuk menciptakan tenaga kerja generasi berikutnya, dengan adanya pengangguran, upah tidak mungkin berada di atas tingkat subsistem. Situasi ini memberikan kesempatan kepada para kapitalis untuk mengakumulasi nilai lebih yang diperolehnya dari buruh, sehingga tabungan mereka bertambah untuk membiayai investasi.

Sosialisme demokrat, kapitalisme tidak akan kolaps (jatuh) dan buruh tidak akan menjadi makin miskin. Sebaliknya kelas buruh makin berperan di dalam menciptakan kehidupan politik yang tertib dan teratur. Dengan berpedoman pada etika, mereka melihat ketimpangan yang terjadi dan berusaha memecahkan

persoalan yang dihadapi dengan program riil dan berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu pemerintah perlu menasionalisasi industri atau sektor ekonomi yang menentukan hajat hidup orang banyak dan milik pribadi dibatasi.

Sistem Ekonomi Indonesia : Sistem Ekonomi Pancasila

Mubyarto dalam bukunya *Sistem dan Moral Ekonomi* (Sukanto Reksohadoprodjo, 2001) menyatakan bahwa sistem ekonomi Pancasila itu ialah : 1) sistem ekonomi yang berorientasi manusia, 2) perjuangan meletakkan landasan ekonomi kekeluargaan dan koperasi, 3) penguasaan negara yang tidak menjurus ke etatisme dan, 4) pembangunan sektor swasta secara terkendali.

Ekonomi Pancasila bukanlah sistem ekonomi baru yang masih harus diciptakan untuk mengganti sistem ekonomi yang kini dianut bangsa Indonesia. Bibit-bibit sistem ekonomi Pancasila sudah ada dan sudah dilaksanakan oleh sebagian masyarakat Indonesia terutama pada masyarakat pedesaan dalam bentuk usaha-usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.

Ekonomi rakyat di mana pun di daerah-daerah benar-benar sudah bangkit tidak sekedar menggeliat, usaha-usaha ekonomi rakyat yang disebut sebagai Usaha Kecil Menengah (UKM) berkembang di mana-mana dengan pendanaan mandiri atau melalui dana-dana keuangan mikro seperti pegadaian, koperasi atau lembaga-lembaga keuangan mikro informal di pedesaan.

Kondisi ekonomi sekarang yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini tidak terletak dalam bidang ekonomi, khususnya ekonomi rakyat, tetapi dalam bidang politik, hukum dan moral. Korupsi yang semakin merajalela yang menyebar dari pusat ke daerah-daerah bersamaan dengan pelaksanaan otonomi daerah bukanlah krisis ekonomi, tetapi krisis moral. Sedangkan kerusakan bangsa diklasifikasikan sebagai kerusakan dalam bidang tatakrama atau etika politik, bukan kerusakan ekonomi Indonesia.

Mengacu mutualisme kemanfaatan yang bisa dipetik dari akses pengembangan ekonomi kerakyatan, maka wajar jika kemudian pemerintah menegaskan tentang platform pengembangan ekonomi ke depan yaitu terfokus pada enam aspek :

1. Mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka NKRI.
2. Meneruskan reformasi dan demokratisasi dalam seluruh aspek kehidupan nasional melalui kerangka, arah dan agenda yang lebih jelas dengan terus meningkatkan sisi penghormatan terhadap hak azasi manusia.
3. Normalisasi dalam kehidupan ekonomi dan juga lebih memperkuat dalam kehidupan perekonomian rakyat.
4. Melaksanakan penegakkan hukum secara konsisten dan berusaha untuk mewujudkan rasa aman dan tenteram.
5. Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif secara lebih konsisten.
6. Mempersiapkan penyelenggaraan tertib administrasi pemerintahan.

Adanya tuntutan dan tantangan bagi optimalisasi pengembangan ekonomi kerakyatan, maka yang harus lebih diperhatikan konseptual tentang ekonomi kerakyatan dimaksudkan untuk lebih mendukung kinerja dan akses operasionalnya. Padahal dalam fenomena sekarang ini keberadaan tersebut kurang memberi arti karena yang akan dipakai untuk mengait sudah menipis persediaannya. Selain itu, meski ada kail dan umpan, ternyata perekapun masih harus berpikir sekiranya kolam empang mana yang akan dipancing.

Ini menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi kerakyatan tidak sesederhana yang dibayangkan, tetapi merupakan suatu konsekuensi yang harus melibatkan semua komponen, baik pemerintah, pelaku bisnis, swasta, dan yang lebih penting adalah kelompok masyarakat tanggal terlibat secara langsung dengan ekonomi kerakyatan tersebut tanpa terkecuali (Edy Purwo, Solopos, 12 Juli 2006).

Membangun Sistem Menarik Investor

Setiap negara untuk keadaan sekarang bersaing sangat ketat dengan negara lain dalam hal investasi, bahkan negara yang membangun sistem dalam menarik investasi belum tentu dapat memenangkan dalam persaingan itu. Karena itu sistem untuk menarik investasi mutlak perlu dibangun dalam rangka perbaikan ekonomi. Kendala dalam mendorong pertumbuhan ekonomi makin bertambah setelah baru-baru ini Ditjen Pajak mengeluarkan kebijakan yang dinilai kontra produktif bagi iklim investasi.

Untuk mencoba memberikan harapan dan mengurangi penderitaan rakyat dan keprihatinan yang besar yang melanda negeri ini seharusnya menjadi pendorong untuk secepatnya membangun kembali perekonomian. Pembenahan iklim investasi kian mendesak untuk secepatnya direalisasikan, antara lain melalui penciptaan kepastian hukum dan reformasi pajak yang semakin mendesak. Investasi dianggap sangat penting dan sangat menentukan maju mundurnya ekonomi suatu negara.

Ada beberapa hal yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk menarik investor yaitu investor biasanya sangat sensitif terhadap lingkungan sosial, politik, hukum dan birokrasi suatu negara. Karena itu, iklim investasi yang menyangkut aspek-aspek non ekonomi tersebut harus dibangun sekondusif mungkin. Sebab lingkungan itu menjadi pertimbangan awal investor untuk masuk atau tidak ke dalam suatu negara (Didik J. Rachbini, 2001).

Iklim investasi di Indonesia yang saat ini tidak kondusif, mesti dibenahi dengan kesadaran kolektif dan tindakan nyata bersama oleh pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut terkait dengan lemahnya penegakan hukum, stabilitas sosial politik dan keamanan di Indoensia. Krisis sektor riil ini dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan dalam jumlah besar disebabkan oleh kelemahan investasi yang masuk ke dalam sistem ekonomi, baik investasi domestik maupun asing.

Investasi yang tidak berhasil diselesaikan oleh pemerintah karena kelemahan kepemimpinan ekonomi. Penentu daya tarik investasi yang pertama adalah pemerintah dan kebijakannya serta ideologinya, jika pemerintah dan kebijakannya

tidak ramah investasi, jangan harap aliran investasi masuk ke dalam perekonomian. Bila kebijakan pemerintah selama kurang mendukung secara maksimum, dalam upaya peningkatan investasi maka membuat Indonesia kalah bersaing dengan negara lain.

Lembaga pelayanan dan sistemnya sangat berpengaruh terhadap investasi. Lembaga yang bertanggung jawab serta berwenang langsung terhadap investasi sangat perlu melakukan program proaktif dalam promosi, sehingga terjadi peningkatan daya tarik investasi.

Hambatan yang masih terlihat adalah kualitas pelayanan investasi di Indonesia yang masih begitu rendah. Pemerintah daerah dengan segala cara semestinya bersaing secara baik untuk meraih investasi asing maupun domestik, tetapi sekarang penerapan otonomi daerah belum mapan dan sering salah kaprah sehingga bisa dikatakan bahwa pembagian kewenangan pusat dan daerah masih merisaukan dan belum mampu menarik minat para investor untuk menanamkan modal di Indonesia.

Jadi perbaikan iklim investasi yang perlu dibangun adalah : Pemerintah harus membangun lembaga pelayanan yang modern dan efisien agar investor mudah dilayani dan senang berada di Indonesia. Peranan pemerintah daerah yang perlu berdiri di depan untuk maju membuka diri bagi investasi serta melakukan promosi yang baik.

Penutup

Investasi baik yang berasal dari asing maupun domestik, sama-sama menurun dan hal itu akibat banyak faktor. Seperti tingginya suku bunga bank, sehingga membuat biaya modal menjadi sangat mahal. Di sisi lain, penyebab kelesuan investasi juga diakibatkan oleh kelesuan pasar yang dipicu oleh rendahnya daya beli masyarakat terutama sejak tahun lalu.

Pelayanan Birokrasi, perizinan dan peraturan daerah harus sesuai dengan peraturan nasional agar mendorong investasi untuk masuk. Pemerintah daerah hendaknya harus lebih inovatif dalam memberikan pelayanan kepada para investor, sehingga dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang akhirnya akan mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Memang ada beberapa daerah yang sudah berusaha mencari terobosan dengan mempercepat pelayanan terhadap investor, namun dalam kenyataan dan praktik di lapangan tetap saja yang namanya birokrasi tersebut lama dan berbelit-belit, karena dengan alasan harus menghadapi banyak urusan. Dalam situasi seperti ini, maka ekonomi biaya tinggi belum sepenuhnya teratasi.

Pemerintah terutama didukung oleh pemerintah daerah perlu segera menawarkan berbagai investasi baru (sebatas proyek infrastruktur), yang siap dimasuki investor. Daerah pun perlu proaktif, karena dalam situasi sekarang ini persaingan antar daerah semakin ketat, selain persaingan dengan negara lain di tingkat global. Masih ada waktu untuk berbuat sesuatu sehingga perlambatan investasi tidak terlampaui parah.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Brojonegoro, Kompas, 2 Juli 2006

Budiono, Kompas, 29 Juli 2006

Didik J Rachbini, 2002, *Politik Ekonomi Baru, Menuju Demokrasi Ekonomi*, Grasindo, Jakarta

Dorojatun Kuntjoro, Kompas, 7 Juli 2006

Edy Purwo, Solopos, 12 Juli 2006

Oman Sukmana, 2005, *Sosiologi Politik Ekonomi*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.

Sukanto Reksohadiprodjo, 2001, *Ekonomi Publik*, BPFE, Yogyakarta

Suparmoko, 2001, *Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, Andi, Yogyakarta.